

# Peran Pemerintah Dalam Struktur Hubungan Industrial Di Indonesia Studi Kasus : Kebijakan Ketenagakerjaan

Dwi Sri Wahyuningsih \*<sup>1</sup>

Amedia Puspa <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pelita Bangsa

\*e-mail : [dwiisrii30@gmail.com](mailto:dwiisrii30@gmail.com) , [amediapuspa@gmail.com](mailto:amediapuspa@gmail.com)

## Abstrak

Hubungan industrial bertujuan untuk meningkatkan tingkat produktif dan kesejahteraan para tenaga dan wirausaha. Dalam melaksanakan struktur hubungan industrial, pemerintah memiliki peranan penting yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penelitian ini akan berfokus kepada peran pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial dengan menetapkan kebijakan ketenagakerjaan kepada para pekerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif menggunakan data kuisisioner yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa pekerja umum seperti pekerja lepas, kontrak, tetap dan pekerja lainnya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 45 responden. Analisis yang digunakan adalah menggunakan Analisa regresi linear yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peran pemerintah dalam struktur hubungan industrial terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah memiliki hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi antara kedua variabel adalah sebesar 61.3% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas pada penelitian, sehingga sisa persentase 38.7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

**Kata kunci:** Peran Pemerintah, Hubungan Industrial, Kebijakan Ketenagakerjaan

## Abstract

Industrial relations aim to increase the productivity and welfare of workers and entrepreneurs. In implementing the structure of industrial relations, the government has an important role, namely determining policies, providing services, carrying out supervision, and acting against violations of Employment laws and regulations. This research will focus on the government's role in implementing industrial relations by establishing Employment policies for workers. This research uses a quantitative method using questionnaire data from interviews with several general workers such as casual, contract, permanent, and other workers. The sample used in this study was 45 respondents. The analysis used is linear regression analysis which aims to determine the relationship between the role of government in the structure of industrial relations on Employment policy. Based on the results of the study, it show that the government role variable has a significant relationship or influence on Employment policy. It can be seen in the coefficient of determination between the two variables that 61.3% can be explained by the independent variables in the study so the remaining percentage of 38.7% is influenced by other variables not examined in this study..

**Keywords:** The Role of Government, Industrial Relations, Employment Policy

## PENDAHULUAN

Hubungan Industrial adalah sebuah sistem hubungan yang menjadikan posisi para pengusaha dan pekerja/buruh sebagai hubungan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama (Gultom, 2008). Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki fungsi dalam kebijakan ketenagakerjaan pada struktur hubungan industrial yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan lanjut terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari hubungan industrial adalah meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha (Sumanto, 2014). Proses hubungan industrial tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya timbul sebuah perselisihan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik

perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu Perusahaan. Sehingga, dalam penyelesaian perselisihan tersebut, peranan pemerintah sangat dibutuhkan. Peranan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengharuskan upaya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah melakukan suatu mediasi antara kedua pihak (Wahyu Triana & Udiana, 2016). Selain itu, perlu dilakukan kebijakan ketenagakerjaan. Penerapan kebijakan ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kerja serta membantu dan mendorong ekonomi yang ada di Indonesia dengan menciptakan bisnis yang stabil dan terpercaya. Kebijakan ketenagakerjaan dibangun untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat industry (Soewono, 2019). Penerapan kebijakan ketenagakerjaan dalam hubungan industrial penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Dengan adanya aturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta keadilan pekerja, meningkatkan kualitas hidup pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan stabilitas dalam dunia kerja. Perlindungan hukum pekerja bermaksud untuk menjaga hak dasar, menjaga perlakuan diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja tanpa mengesampingkan kepentingan pengusaha dan dunia usaha (Putra dkk., 2020).

Penelitian ini berfokus pada dua variabel independent dan variabel dependen yang meliputi Peran Pemerintah dan Kebijakan Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah peran pemerintah memiliki pengaruh atau hubungan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan observasi berupa perolehan data melalui kuesioner dan wawancara kepada para responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan hubungan antara masing-masing variabel dan menentukan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Sampel penelitian terdiri dari 45 responden yang merupakan beberapa tenaga kerja atau pekerja umum yang meliputi pekerja kontrak, pekerja tetap, dan pekerja lepas. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisa regresi linier, yang memberikan gambaran tentang kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Secara umum, kebijakan ketenagakerjaan merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar tidak terjadinya sebuah penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan dan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Achmad, 2016).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan literatur kepada para tenaga kerja maupun pemerintah. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peran pemerintah dalam struktur hubungan industrial dapat mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan yang memiliki banyak manfaat yaitu menciptakan kesejahteraan kepada para tenaga kerja, dan para tenaga kerja akan merasa aman karena pemerintah selalu melakukan pengawasan dan monitoring para tenaga kerja.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berupaya mengidentifikasi data dengan menerapkan analisis statistik tertentu untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian kuantitatif dapat menjawab rumusan masalah dengan merumuskan hipotesis berdasarkan konsep dan teori yang ada (Arikunto, 2017). Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Kebijakan Ketenagakerjaan dan variabel dependen yaitu Peran Pemerintah dalam struktur hubungan industrial. Metode pengumpulan dengan menggunakan data primer melalui pengisian kuesioner dan wawancara langsung dengan para tenaga kerja umum seperti pekerja tetap, pekerja lepas, dan pekerja kontrak. Menurut (Sugiyono, 2015), Populasi merupakan objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Sampel

yang digunakan pada penelitian ini para pekerja umum yang terdiri dari pekerja tetap, kontrak, pekerja lepas dan lainnya.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan instrument penelitian yaitu uji validitas dan reliabel (Sugiyono, 2015). Menurut (Ghozali, 2019), Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kuisioner dapat dianggap valid atau tidak. Suatu kuisioner dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dan nilai r tersebut positif, maka pertanyaan tersebut dianggap valid dan dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah kuisioner mampu menghasilkan hasil yang konsisten atau stabil dalam mengukur indikator dari variabel tertentu (Ghozali, 2019). Setelah data dinyatakan valid dan reliabel maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik ialah sebuah analisis prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang akan digunakan memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji seperti Uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Jika uji syarat tersebut terpenuhi maka tahap terakhir adalah melakukan uji regresi linear. Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk menentukan arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2019). Pada analisis regresi linear terdiri dari beberapa nilai uji yaitu nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), koefisien korelasi, uji hipotesis yang meliputi uji F (simultan) dan uji T (parsial). Secara matematis, persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + e$$

Keterangan:

Y = Kebijakan Ketenagakerjaan

X = Peran Pemerintah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Standar Error/Nilai Residu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Hasil Uji Intrumen Penelitian (Validitas dan Reliabilitas)

Tabel 1. Hasil Uji Validitas-Reliabilitas

Variabel	Cronbach's	Nilai Kritis	Keterangan
Indikator	r-hitung		
Kebijakan Ketenagakerjaan (Y)	0.819	0.600	Reliabel
Y.1	0.660	0.294	Valid
Y.2	-0.026	0.294	Tidak Valid
Y.3	0.720	0.294	Valid
Y.4	0.756	0.294	Valid
Y.5	0.692	0.294	Valid
Y.6	0.794	0.294	Valid
Y.7	0.340	0.294	Valid
Y.8	0.733	0.294	Valid
Y.9	0.767	0.294	Valid
Y.10	0.648	0.294	Valid
Peran Pemerintah (X)	0.795	0.600	Reliabel
X.1	0.587	0.294	Valid
X.2	0.489	0.294	Valid
X.3	0.671	0.294	Valid
X.4	0.685	0.294	Valid
X.5	0.648	0.294	Valid

	X.6	0.673	0.294	Valid
	X.7	0.758	0.294	Valid
	X.8	0.379	0.294	Valid
	X.9	0.363	0.294	Valid
	X.10	0.689	0.294	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Informasi dari tabel 1 merupakan hasil pengujian validitas dan realibilitas dari setiap item pada setiap variabel penelitian. Pada nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) dengan batas nilai kritis sebesar 0.600, dan dapat dilihat nilai variabel Peran Pemerintah (X) dan Kebijakan Ketenagakerjaan (Y) keseluruhan nilai kritisnya diatas batas minimal nilai kritis 0.600, sehingga keseluruhan variabel penelitian dinyatakan Reliabel. Selanjutnya nilai kritis pada perbandingan validitas dengan r-tabel sebesar 0.294, dari hasil setiap data kuesioner pada setiap variabel didapat nilai r-hitung pada variabel Peran Pemerintah (X) diatas batas kritis nilai r-tabel 0.294. Sedangkan, pada variabel Kebijakan Ketenagakerjaan (Y) terdapat satu item yang memiliki nilai r hitung lebih kecil dari 0.294 sehingga dapat dinyatakan keseluruhan data kuesioner pada penelitian valid dan dapat diteruskan ketahap berikutnya.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Normalitas Data**

**Tabel 2.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.01323460
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.048
	Negative	-.114
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.179 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Informasi dari tabel 2 merupakan hasil pengujian normalitas data penelitian, pada nilai signifikansi pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) ialah sebesar 0.114. dengan demikian dari informasi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0.114 > nilai alpha 5% (0.05), sehingga disimpulkan bahwa data residual yang diteliti berdistribusi normal. Maka, dilakukan uji selanjutnya.

**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Peran Pemerintah (X)	1.000	1.000
a. Dependent Variable: Kebijakan Ketenagakerjaan (Y)			

Informasi dari tabel 3 merupakan hasil pengujian multikolinearitas, nilai *Variance Inflation Factor* ( VIF) menjelaskan bahwa nilai VIF < 10.00 dari batas ukuran, serta nilai pada *tolerance* keseluruhan variabel independen Peran Pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pada penelitian tidak terindikasi gejala multikolinearitas, dan dapat diteruskan ketahap berikutnya.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.** Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.360	2.083		2.573	.014
	Peran Pemerintah (X)	-.057	.057	-.151	-1.005	.321

a. Dependent Variable: ABSRES

Informasi dari tabel 4 merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas, nilai signifikansi variabel Peran Pemerintah (X) memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari standar alpha 5% atau 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sehingga dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

**Hasil Uji Hipotesis Penelitian**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 5.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 <sup>a</sup>	.621	.613	4.05963

a. Predictors: (Constant), Peran Pemerintah (X)  
 b. Dependent Variable: Kebijakan Ketenagakerjaan (Y)

Sumber: Data penelitian diolah (2025)

Informasi dari tabel 5 didapat kesimpulan bahwa bahwa variabel Peran Pemerintah (X) terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan (Y) didapat nilai Adjusted R Square sebesar 0.613 atau 61.3% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas tersebut, sehingga sisa persentase 38.7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

**Hasil Uji F (Simultan)**

**Tabel 6.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1163.245	1	1163.245	70.583	.000 <sup>b</sup>
	Residual	708.666	43	16.481		
	Total	1871.911	44			

a. Dependent Variable: Kebijakan Ketenagakerjaan (Y)  
 b. Predictors: (Constant), Peran Pemerintah (X)

Sumber: Data penelitian diolah (2025)

Informasi dari tabel 6 merupakan hasil dari uji-F (simultan) variabel bebas yaitu Peran Pemerintah (X) berpengaruh signifikan pada variabel Kebijakan Ketenagakerjaan (Y). Informasi tersebut dapat dilihat dari nilai nilai signifikansi (0.000) lebih kecil dari tingkat alfa 5% (0.05), hasil ini membuktikan secara serentak model regresi variabel bebas berpengaruh terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan (Y)

**Hasil Uji T (Parsial)**

**Tabel 7.** Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.624	3.778		.694	.491
	Peran Pemerintah (X)	.871	.104	.788	8.401	.000

a. Dependent Variable: Kebijakan Ketenagakerjaan (Y)

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Hasil uji parsial pada informasi tabel 7, dapat diinformasikan bahwa variabel Peran Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar (0.000) lebih kecil dari nilai alfa 5% (0.05), dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Pemerintah apabila secara parsial berpengaruh pada Kebijakan Ketenagakerjaan.

**Hasil Uji Regresi Berganda**

**Tabel 8.** Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.624	3.778		.694	.491
	Peran Pemerintah (X)	.871	.104	.788	8.401	.000

a. Dependent Variable: Kebijakan Ketenagakerjaan (Y)

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Informasi tabel 8 dapat dibuat model persamaan regresi linier ganda berlandaskan pada kolom B (*Unstandardized Coefficients*). Sehingga model persamaan regresi hasil dari penelitian ini dapat dibuat seperti berikut:

$$Y = 2.624 + 0.871X_1 + e$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan model persamaan regresi diatas, apabila variabel independen tidak ada, maka nilai Kebijakan Ketenagakerjaan (Y) adalah sebesar 2.624. Selain itu, diketahui nilai koefisien regresi variabel Peran Pemerintah (X) sebesar 0.871, hal ini menandakan bahwa tiap kenaikan 1% Peran Pemerintah (X), maka Kebijakan Ketenagakerjaan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.871 atau 87.1%.

**PEMBAHASAN**

**Variabel Peran Pemerintah (X) terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Pemerintah dalam struktur hubungan industrial memiliki pengaruh positif terhadap variabel Kebijakan Ketenagakerjaan. Pada hasil uji regresi menunjukkan bahwa setiap meningkatnya Peran Pemerintah maka Kebijakan Ketenagakerjaan akan mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan koefisien regresi sebesar 0.871 dengan tingkat signifikansi 0.000 pada model pertama dan pada model kedua memiliki koefisien sebesar (-0.057) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.321. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nanda (2024) yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kebijakan ketenagakerjaan pada struktur hubungan industrial. Pemerintah harus mengontrol keberlangsungan proses agar tetap stabil dan sustainability dan pemerintah harus selalu melakukan pengasawasn terhadap pelaksanaan pada struktur hubungan industrial di perusahaan ubtuk memastikan kepatuhan para tenaga kerja terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi karena semua variabel penelitian yaitu Peran Pemerintah dan Kebijakan Ketenagakerjaan memiliki nilai valid dan reliabel yang diambang batas nilai kritis. Selain itu, berdasarkan uji prasyarat atau uji kelayakan model diketahui bahwa data berdistribusi normal, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil Analisa regresi linear diperoleh Kesimpulan bahwa variabel peran pemerintah dalam struktur hubungan industrial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi Achmad. (2016, August 23). "Pengawasan Ketenagkerjaan diperlukan untuk kurangi Tenaga Kerja Asing." [Http://Ekonomi.Kompas.Com/Read](http://Ekonomi.Kompas.Com/Read).
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariative Dengan Program IBM SPSS 25 (9th edition)*. Badan Universitas Diponegoro.
- Gultom. (2008). *Aspek Hukum Hubungan Industrial*. Inti Prima Promosindo.
- Nanda, A. S. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial (Studi Perjanjian Kerja Bersama Pt. Bukit Makmur Mandiri Utama Job Site Pt. Adaro Indonesia)*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Putra, A. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 12–17. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2428.12-17>
- Soewono, D. H. (2019). Peran Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Di Perusahaan. *Jurnal Hukum Unik Kediri*, 1–13.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumanto. (2014). *Hubungan Industrial*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wahyu Triana, I. N., & Udiana, I. M. (2016). Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perjanjian Bersama Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya*, 04(04).